



Pengantar Redaksi

'Menerjemahkan-ulang Konsep Ruang dan Urbanisme'

Dalam penerbitan Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol.4 No 1 Januari-Juli 2017 ini dewan redaksi Jurnal Pemikiran Sosiologi dari Departemen Sosiologi, Fisipol UGM menghadirkan pembahasan tiga tema utama mengenai keberlanjutan pembangunan dalam tata kelola ruang dan masyarakat urban, kerentanan akibat pembangunan, serta kebijakan mengenai tata kelola tersebut. Keseluruhan tema-tema tersebut kami bingkai di dalam tajuk 'Menerjemahkan-ulang Konsep Ruang dan Urbanisme'. Pilihan tajuk tersebut bukan tanpa alasan. Alasan yang mendasari adalah perkembangan di dalam wacana dan praktik mengenai pembangunan dan tata kelola ruang selama ini cenderung didominasi oleh gagasan-gagasan pembangunan yang lebih mempertimbangkan pada akselerasi modal dan kapital, perluasan pembangunan infrastruktur dan upaya untuk mendapatkan manfaat keuntungan ekonomi yang lebih berpihak pada kepentingan kapitalisme, seperti pemilik modal. Ekspansi atas pemanfaatan ruang secara spasial demi kepentingan memperoleh keuntungan oleh pasar dan industri atau korporasi global telah berdampak secara signifikan pada menyempitnya lahan-lahan bagi kehidupan manusia secara privat, kerusakan ekologis, dan bahkan melahirkan kerentanan sosial seperti konflik, kemiskinan, dan gentrifikasi dimana terjadi kesenjangan sosial yang nyata dan tinggi di dalam masyarakat.

Dalam pembahasan Sosiologi, selama ini persoalan-persoalan di atas banyak dibahas oleh kajian Sosiologi Pembangunan, atau

Sosiologi Perkotaan. Kenyataannya, problem mengenai ruang bukan hanya persoalan yang bisa diamati melalui penjelasan secara spasial semata, khususnya ketika urbanisasi berlangsung secara ekspansif sehingga mengubah moda produksi kehidupan masyarakat tradisional misalnya yang semula berbasis pada pertanian. Semakin banyak wilayah yang kini mengalami proses urbanisasi, sebagaimana kini semakin banyak jumlah populasi penduduk yang tinggal di kota-kota atau wilayah yang mengalami urbanisasi, ketimbang di pedesaan atau di pedalaman.

Tugas Sosiologi baik sebagai ilmu pengetahuan sosial maupun sebagai ilmu sosial terapan adalah untuk mengkaji konstruksi sosial dan menelisik bagaimana kontradiksi terjadi di dalam praktik sosial, paradoks apa yang melatarbelakangi suatu fenomena sosial, serta ironi yang diakibatkan dari konstruksi sosial tersebut sehingga dapat merumuskan suatu rekomendasi bagi rancangan kebijakan dan praktik sosial yang lebih berkeadilan. Kajian Sosiologi secara kritis mendorong upaya bagaimana pemahaman mengenai produksi ruang bukan semata-mata analisis mengenai kondisi fisik yang konkrit atas ruang secara *'for granted'* atau secara alamiah. Pembangunan kota misalnya, bukan sesuatu yang secara alamiah hadir sebagai bagian dari kebutuhan perkembangan peradaban manusia khususnya di dalam masyarakat moderen. Melainkan suatu konstruksi sosial yang bersifat politis. Justru karena itulah, konsep tentang produksi ruang kini menjadi suatu kontestasi di dalam merumuskan konsep mengenai pembangunan khususnya yang mempertimbangkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dimana manusia yang menempati ruang tersebut beraktivitas atau bereproduksi. Gagasan mengenai produksi



ruang inilah yang juga menjadi perhatian dan pengamatan di dalam kajian-kajian sosiologis. Sementara itu, urbanisme adalah suatu kajian mengenai bagaimana suatu kota dirancang atau didesain dan selama ini lebih banyak dikaji secara teknis seperti melalui pendekatan desain arsitektural yang menekankan pada materi dan khususnya pembangunan infrastruktur. Sosiologi Perkotaan (Urban Sociology) selama ini justru cenderung melegitimasi dominasi kuasa pengetahuan yang memahami urbanisme melalui pendekatan mengenai pembangunan infrastruktur kota secara fisik misalnya. Akibatnya analisis yang dilahirkan hanya berfokus pada bentuk-bentuk interaksi sosial yang berkembang di perkotaan semata dan kurang menghadirkan suatu narasi kritis yang memadai tentang konstruksi sosial yang bersifat politis atas dirancangnya suatu kota melalui produksi ruang. Sementara itu, kajian-kajian Sosiologi Pembangunan (Sociology of Development) telah lama dikritisi oleh banyak sarjana atau ilmuwan sosial di dunia karena merekomendasikan gagasan-gagasan pembangunan yang bersifat 'eurosentris' sehingga cenderung mengabaikan aspek lokalitas dan budaya setempat yang secara khusus tidak selalu dapat mengapropriasi logika-logika pembangunan yang semata-mata dipahami sebagai transformasi masyarakat secara moderen menurut ukuran-ukuran pencapaian peradaban di negara-negara barat yang maju. Hal itu kemudian berpengaruh di dalam perkembangan Sosiologi dalam mengkaji urbanisme yang juga dipengaruhi pula oleh gagasan-gagasan pascamodernisme (postmodernism) dan pascastrukturalisme (poststructuralism) dimana produksi ruang dipahami sebagai suatu produk sosial yang bersifat politis. Artinya, dalam tatakelola ruang selalu ada kepentingan yang bersifat dominan dalam merancang pembangunan

infrastruktur, pemanfaatan atas ruang dan bagaimana individu dan masyarakat berinteraksi dipengaruhi oleh tatanan-tatanan yang dibangun atas keberadaan ruang tersebut, baik melalui pengalaman secara fisik maupun secara mental.

Berkenaan dengan upaya untuk menghadirkan wacana mengenai bagaimana kita bisa mendefinisikan kembali konsep atas ruang dan urbanisme itulah edisi Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol. 4 No 1 tahun 2017 ini mencoba menghadirkan wacana-wacana kritis yang didasari oleh kajian dan praktik atas ruang sebagai suatu konstruksi sosial yang bersifat politis dengan menyeleksi delapan artikel terpilih untuk penerbitan edisi kali ini.

Artikel pertama ditulis oleh Frans Ari Prasetyo berjudul 'Car Free Day: Transformasi Ruang dan Globalisasi Urbanisme Kontemporer di Bandung'. Dalam kajian ini penulis menganalisis bagaimana aktivitas *Car Free Day* menjadi ajang komersialisasi baru dalam penciptaan ruang publik di kota Bandung. Melalui pendekatan analisis arsitektur lansekap dan etnografi visual, peneliti mengamati pemanfaatan atas ruang dari fungsi kesehariannya maupun berdasarkan momentum yang diciptakan (dirancang) sebagai suatu produk sosial yang bersifat politis. Aktivitas *Car Free Day* yang merupakan suatu rekayasa sosial untuk merespon polusi yang menggancam keseimbangan ekologis pada kenyataannya justru menjadi arena produksi dan konsumsi baru yang melibatkan densitas atau kepadatan manusia dan melahirkan persoalan-persoalan baru yang juga sama kompleksnya dengan efek polusi kendaraan bermotor.

Artikel kedua ditulis oleh Galang Geraldly berjudul 'Determinasi Kapitalisme Industri



dalam Politik Penataan Ruang di Kabupaten Gresik'. Dalam artikel ini penulis mengkaji bagaimana ekspansi industri yang telah lama berlangsung di Kabupaten Gresik telah berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang mengancam kehidupan warga sekitarnya. Dampak tersebut belum dapat ditanggulangi oleh pemerintah setempat karena dalam tata kelola pemanfaatan atas ruang dan pembangunan, pemerintah lebih banyak memberikan peluang bagi perluasan industrialisasi ketimbang mempertimbangkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kawasan yang mempertimbangkan aspek keseimbangan ekologis. Determinasi kapitalisme industri inilah yang menjadi alasan mengapa tata kelola ruang di Kabupaten Gresik kini memerlukan adanya terobosan baru melalui kehendak politik khususnya dari pemerintah setempat. Menurut penulis, terobosan itu dapat dilakukan dengan mengajukan konsep mengenai '*agrarian urbanism*' atau rancang bangun perkotaan yang meng-interkoneksi-kon praktik ekonomi dengan pemanfaatan ruang-ruang di perkotaan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang hijau melalui aktivitas pertanian.

Artikel ketiga ditulis oleh Kamil Alfi Arifin berjudul 'Perumahan Muslim dan Politik Ruang di Yogyakarta'. Munculnya perumahan yang menggunakan label 'Islami' menurut penulis merupakan siasat atau strategi kapitalis yang membingkai kepentingan melalui klaim atas nilai-nilai ideologis agama (dalam hal ini adalah Islam). Melalui pengamatan dan kajian berdasarkan pada studi kasus, penulis mendapatkan fakta bahwa pembangunan semacam ini dimungkinkan karena pihak pembangun atau pengembang perumahan (*developer*) bekerjasama dengan para elit kelompok Muslim tertentu di Yogyakarta. Pada kenyataannya, perumahan Muslim

yang dikomersialisasikan tersebut tidak memiliki kekhususan di dalam wujud tradisi yang secara spesifik mewakili interpretasi atas nilai-nilai keislaman. Pembangunan perumahan semacam ini justru menjadi bentuk pengklasifikasian pemukiman penduduk yang mengutamakan homogenitas budaya secara sosial. Dengan kata lain, klaim atas nilai-nilai agama (keislaman) dalam praktik perumahan tersebut hanya mengindikasikan kepentingan kapitalistis yang bersifat mutual antara pihak *developer* dan para elit kelompok-kelompok Muslim tertentu saja.

Artikel keempat ditulis oleh Rahadian Ranakamuksa Candiwidoro berjudul 'Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970)'. Melalui metode penulisan sejarah, penulis mendeskripsikan bagaimana sejarah urbanisasi berlangsung di Jakarta khususnya pada periode yang dimulai dari berakhirnya perang kemerdekaan di tahun 1949 hingga di masa awal Orde Baru yang mengutamakan pembangunan di tahun 1970. Artikel ini memberikan penjelasan bagaimana terbentuknya masyarakat yang multikultur berlangsung di ibukota dan konstruksi nasionalisme pada saat itu yang berdampak pada gelombang migrasi para pendatang dari luar Jakarta termasuk dari pulau-pulau lain di luar Jawa. Pembangunan Jakarta sebagai kota moderen yang secara ikonik dikaitkan dengan sejarah nasionalisme Indonesia pada kenyataannya memunculkan persoalan baru dimana para pendatang tidak selalu dapat beradaptasi di dalam kehidupan moderen yang terstratifikasikan oleh kelas sosial ketimbang oleh identitas budaya. Akibatnya, pada masa awal Orde Baru di tahun 1970an, Jakarta dihadapkan pada persoalan baru yaitu terjadinya gentrifikasi dimana pemerintah kota pada saat itu



untuk pertamakalinya berhadapan dengan bagaimana mengatasi persoalan urbanisasi dan kemiskinan di ibukota. Hal ini masih menjadi persoalan di Jakarta hingga hari ini.

Artikel kelima ditulis oleh Eka Zuni Lusi Astuti yang berjudul 'Tatakelola Inovatif dalam Penanganan Masyarakat Rentan: Belajar dari Kewirausahaan Yayasan Girlan Nusantara'. Melalui pendekatan *institutional entrepreneurship* (kewirausahaan), penulis mengkaji bagaimana upaya inovatif dalam menangani kelompok-kelompok rentan perkotaan yang termarginalisasikan dilakukan oleh organisasi sipil kemasyarakatan (CSO - civil society organization) seperti Yayasan Girlan Nusantara. Penulis menjabarkan bagaimana pola-pola inovatif tersebut dilakukan sehingga dapat menyediakan pelayanan sosial yang memadai khususnya bagi masyarakat rentan di perkotaan. Strategi yang mengutamakan pada pembangunan komunitas merupakan suatu sinergi yang melibatkan peran aktor wiralembagawan dengan pihak-pihak lain seperti pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah (NGO) dan juga organisasi masyarakat sipil lainnya (CSO).

Artikel keenam ditulis oleh Wahyu Kustiningsih berjudul 'Kelompok Rentan dalam Pembangunan Kawasan Kota Bandara di Kulon Progo: Studi Kasus New Yogyakarta International Airport (NYIA)'. Dalam artikel ini penulis menjelaskan bagaimana pembangunan bandara juga melibatkan pembangunan kawasan kota bandara (*city airport*) sebagai infrastruktur penunjang pengembangan wilayah perkotaan. Meski demikian, pembangunan ini justru memusatkan aktivitas ekonomi yang dibangun berdasarkan jaringan bisnis pemodal besar atau yang sering disebut dengan istilah aglomerasi ekonomi

(*agglomeration of economies*) dimana aktivitas tersebut dikelola melalui privatisasi pemilik modal. Akibatnya, pembangunan bandara dan kawasan kota bandara didominasi oleh kepentingan atas privatisasi ketimbang mempertimbangkan bagaimana masyarakat setempat di wilayah tersebut dapat terdampak secara positif atau ikut memperoleh manfaat atas pembangunan tersebut. Hal inilah yang kemudian memunculkan kelompok-kelompok rentan yang terancam pola kelangsungan hidupnya karena pembangunan tersebut tidak mengikutsertakan bagaimana kelangsungan hidup mereka dapat dijamin oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pembangunan bandara baru internasional di Yogyakarta itu. Penulis merekomendasikan tindak lanjut untuk mengatasi kerentanan tersebut melalui rancang bangun dan tata kelola yang mempertimbangkan kerentanan sosial yang didukung oleh kebijakan yang mempertimbangkan keadilan sosial serta pembangunan komunitas.

Artikel ketujuh ditulis oleh Adityo Nugroho berjudul 'Komunitas Muda Urban Mengelola Sampah: Kajian Partisipatoris Gerakan Peduli Sampah Nasional di Kota Yogyakarta'. Melalui pendekatan partisipatoris dan analisis kualitatif, penulis mendeskripsikan bagaimana gerakan lingkungan diinisiasi dan dikelola oleh kaum muda perkotaan. Artikel ini mendeskripsikan kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas muda urban yang bergabung di dalam Aliansi Komunitas Yogyakarta melalui kegiatan Peduli Sampah Nasional. Deskripsi atas kegiatan itu menjelaskan bagaimana pendidikan mengenai lingkungan dapat dilakukan dan dipraktikkan dengan melibatkan kelompok-kelompok usia muda sebagai agensi sosial yang ikut terlibat dalam pengelolaan



sampah berbasis komunitas (*community waste management*).

Artikel ke delapan ditulis oleh Muhammad Nurkhoiron berjudul ' Mengembangkan Kota HAM di Indonesia: Peluang dan Tantangannya'. Penulis melakukan kajian yang bersifat partisipatoris berdasarkan pengalamannya di dalam mempromosikan dan melakukan edukasi mengenai hak asasi manusia melalui keterlibatannya di dalam program-program yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dengan mengambil dua studi kasus dimana praktik atas kota HAM pernah dilakukan di Indonesia, yaitu di kota Palu dan kota Wonosobo, penulis merumuskan perlunya persebaran wacana tentang pembangunan kota ramah HAM. Hal ini karena kota sebagai ruang hidup bersama juga melahirkan begitu banyak kerentanan sehingga dapat memunculkan peluang bagi pelanggaran HAM baik yang pernah terjadi di masa lalu maupun yang secara potensial dapat terjadi sebagai dampak dari kebijakan tata kelola pembangunan kota. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam hemat penulis menjadi sangat penting di dalam mengambil peranan sentral untuk mendorong terbentuknya suatu kota dimana warganya memiliki kedaulatan atas kehidupan yang dijalani di dalam kota tersebut.

Demikianlah sajian-sajian artikel tersebut kami hadirkan sebagai bagian dari upaya dan eksplorasi kritis untuk menerjemahkan kembali konsep atas ruang dan urbanisme. Pemilihan artikel-artikel tersebut dalam hemat kami, dewan redaksi Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM didasari oleh prioritas untuk menghadirkan pewacanaan yang kritis mengenai produksi ruang dan urbanisme sebagai suatu konstruksi sosial yang bersifat politis. Selain itu, keragaman dari perspektif yang diwakili oleh masing-

masing artikel tersebut bukan hanya berhenti pada strategi pewacanaan semata melainkan juga memberi peluang bagi munculnya gagasan-gagasan yang dapat dipraktikkan sebagai alternatif untuk tata kelola ruang dan kebijakan yang mempertimbangkan aspek dan rasa keadilan sosial khususnya di Indonesia. Semoga menginspirasi.

Salam,

Dewan Redaksi Jurnal Pemikiran Sosiologi.